

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi yang cukup *massive* menjadi salah satu bentuk kesadaran pemerintah akan pentingnya peran dari perempuan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Berdasarkan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan tahun 2018 nilai IPM Kota Bekasi untuk laki-laki dan perempuan masih berada dibawah angka kesejahteraan begitu pula dengan nilai IDG Kota Bekasi.

Melalui program pemberdayaan perempuan yang diwadahi oleh DPPPA Kota Bekasi guna menciptakan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Kota Bekasi. Seluruh program pemberdayaan yang dirancang oleh Kota Bekasi bertujuan dalam mengembangkan kemampuan masyarakatnya dan serta meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan hal ini dapat dibuktikan melalui adanya peningkatan kualitas dan peran perempuan khususnya dari segi perekonomian. Perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sendiri menjadi bukti nyata dari komitmen Kota Bekasi dalam menciptakan Kota yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (*responsive gender*).

Strategi dari Kota Bekasi Sendiri secara tidak langsung dapat dilihat melalui program yang dilaksanakan setiap tahunnya, antara lain: pemberdayaan perempuan bidang ekonomi melalui program-program pelatihan kewirausahaan guna

meningkatkan perekonomian perempuan di Kota Bekasi; peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pengetahuan, teknologi, dan Pendidikan; perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi sendiri tidak terlepas dari adanya kendala yang dialami oleh DPPPA Kota Bekasi dalam pelaksanaannya, kendala tersebut diantaranya ialah:

1. Rendahnya kesadaran perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam lembaga legislatif;
2. Tingkat persaingan yang ketat dengan calon legislatif pria;
3. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pada lembaga dalam menjalankan program;
4. dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

1. DPPPA Kota Bekasi sendiri telah mempersiapkan beberapa skenario yang dapat menyesuaikan dengan keadaan.
2. Masyarakat diberikan gambaran dan pemahaman mengenai manfaat yang akan mereka dapatkan dengan mengikuti program-program pemberdayaan.
3. Mempersiapkan setiap program dengan matang.
4. Adanya keterlibatan pihak swasta dan SKPD lain.

4.2 Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan saran dari hasil yang sudah dijabarkan pada karya ilmiah ini adalah

1. Kepada Pemerintah Kota Bekasi: Perlu ada perhatian lebih terhadap perempuan yang telah mengikuti kegiatan pelatihan; Pemerintah harus dapat menghidupkan kelompok PEKKA dan PKK agar dapat berperan lebih di daerah yang telah terbentuk maupun belum ada kelompok tersebut; Pemerintah perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi perempuan usia muda pentingnya peran Wanita dalam bangku legislatif; pemerintah dapat menciptakan inovasi lebih guna meningkatkan peran kader perempuan dalam ranah legislatif; dan Pemerintah dapat menciptakan kebijakan, kegiatan, dan program yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih nyata.
2. Kepada Masyarakat: Diharapkan masyarakat dapat mendukung program pemerintah dengan cara ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah; Perempuan diharapkan dapat berpandangan bahwa mereka memiliki kebebasan dan posisi yang setara terhadap laki-laki baik dalam ranah public; Kesadaran perempuan untuk mau ikut berpartisipasi dalam ranah legislatif di Kota Bekasi; Diharapkan masyarakat dapat mengembangkan jiwa wirausaha ekonomi berbasis industri rumahan yang telah banyak diberikan pelatihan oleh pemerintah Kota Bekasi.